

POTESI EKONOMI DAERAH PROVINSI BALI

Luh Nyoman Fajar Nur Ayu¹
Ni Luh Putu Wiagustini²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: luhnyomanfajarnurayu@gmail.com

ABSTRAK

Mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah merupakan upaya meningkatkan PAD sebagai wujud penerapan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui PDRB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah Provinsi Bali perkabupaten/kota, sehingga meneliti di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali. Populasi dan sampel yang digunakan adalah 17 sektor lapangan usaha dalam PDRB pada tahun 2012-2015 yang menjadi potensi ekonomi daerah, sehingga metode penentuan sampelnya adalah sensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Tipologi Klassen. Hasil penelitian di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali, potensi ekonomi daerah yang sama pada sektor unggulan adalah sektor konstruksi, sektor berkembang adalah sektor kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor potensial adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor terbelakang adalah sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang. Kedepannya pemerintah diharapkan membangun daerah dengan memprioritaskan sektor unggulan, namun tidak mengabaikan sektor lainnya yang disesuaikan pada RKP Indonesia dan RKPD Provinsi Bali.

Kata kunci: tipologi klassen, potensi ekonomi daerah, otonomi daerah

ABSTRACT

Optimizing the management of the economic potential of the region is an effort to increase local revenue as a form of regional autonomy. Regional economic growth is measured by the GRDP. The purpose of this research aims to discover the economic potential of the region in the districts/cities in province of Bali, so researched in all districts/cities of Bali. The population and the sample used is 17 sectors in the GRDP by industrial origin period 2012 to 2015 which became the economic potential of the region, so the method of determining the sample is census. The research used was analysis Klassen Typology. The results of research in each district/city province of Bali, the same economic potential of the region in the category of primary sector is the construction sector, stagnant sector is the sector of human health and social work activities. Potential sectors is sector of agriculture, forestry and fishing. Underdeveloped sector is sector of electricity and gas; sector of water supply, sewerage management, waste and remediation activities. In the future, the government is expected to economic development by prioritizing the primary sectors, but do not neglect other sectors are adjusted on government work plans's Indonesia and development plans's Province of Bali.

Keywords: *klassen typology, the economic potential of the region, regional autonomy*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Indonesia sejak tahun 2001 telah melaksanakan otonomi daerah (Mahmudi, 2009:2). Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diberikan pemerintahan daerah tingkat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan (Andriyani, 2014:1). Pemerintahan daerah dapat melakukan kegagalan perencanaan pembangunan daerah jika tidak mampu mengidentifikasi potensi unggulan daerahnya (Badrudin, 2012). Pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui peningkatan kegiatan produksi barang dan jasa yang diukur melalui PDRB menurut lapangan usaha. PDRB Provinsi Bali atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2012-2015 terus meningkat, namun laju pertumbuhannya berfluktuasi seperti pada Tabel 1. Penurunan terjadi pada tahun 2013 yaitu 6,96% menjadi 6,69%, kemudian pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRBnya kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6,72% menjadi 6,04%.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 2012-2015

Tahun	PDRB (dalam miliar rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2012	106.951,46	6,96
2013	114.103,58	6,69
2014	121.779,13	6,72
2015	129.137,91	6,04

Sumber: Bali dalam angka 2016

Sasaran pembangunan kedua adalah pemerataan hasil pembangunan, Pada kenyataannya ketidakmerataan antarkabupaten/kota masih menjadi tugas bersama pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota seperti pada Tabel 2. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Bali atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2012-2015 adalah Kabupaten Badung mencapai Rp 29.178,33 Miliar, sedangkan Kabupaten Bangli meskipun mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, tetapi kontribusi tersebut masih jauh lebih kecil dari Kabupaten Badung yaitu tahun 2015 hanya mampu menghasilkan Rp 3.687,99 Miliar.

Tabel 2.
PDRB perkabupaten/kota Provinsi Bali Tahun 2012-2015
(dalam miliar rupiah)

Kabupaten/Kota		2012	2013	2014	2015
1	Jembrana	6.365,85	6.727,78	7.134,66	7.579,12
2	Tabanan	10.500,46	11.178,19	11.908,32	12.651,39
3	Badung	24.027,65	25.666,53	27.456,88	29.178,33
4	Gianyar	12.508,66	13.364,39	14.272,74	15.173,31
5	Klungkung	4.036,35	4.280,45	4.536,26	4.813,03
6	Bangli	3.097,05	3.281,16	3.472,21	3.687,99
7	Karangasem	7.538,03	8.002,13	8.482,95	8.992,27
8	Buleleng	15.480,21	16.587,19	17.740,83	18.824,84
9	Denpasar	23.397,17	25.026,37	26.777,48	28.433,25

Sumber: BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2016

Ketidakmerataan pembangunan daerah di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali mendorong praktisi pemerintah daerah untuk memperhitungkan cara yang tepat dengan mengikutsertakan pemerintahan dan partisipasi masyarakat menggunakan setiap sumber daya guna menaksirkan potensi ekonomi daerah untuk merancang dan membangun perekonomian daerah demi mencapai pertumbuhan ekonomi ideal (Arsyad, 2015:374). Untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, modal SDM memiliki peranan yang penting karena melalui SDM terjadi inovasi dan pengembangan modal lainnya (Barro, 1991). Melalui peningkatan kualitas SDM dalam mengelola potensi ekonomi daerah, maka kemampuan investasi dalam suatu pengembangan sektor ekonomi suatu negara diharapkan juga meningkat (Carlin & Colin, 2003).

Teknik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi terkait potensi ekonomi daerah adalah Tipologi Klassen, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, *Location Quotient* (LQ), dan *Shift share* (Arsyad, 2015:389). Munandar & Edi (2015) secara umum teknik untuk mengklasifikasi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah analisis *Shift share*, *Gain Index*, Index Williamson, dan Tipologi Klassen.

Shift share mengukur kinerja dan produktivitas sektor perekonomian daerah melalui perbandingan antara laju pertumbuhan sektoral ekonomi regional dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tingkatannya. Mack dan David (1996) menyatakan bahwa, LQ digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan suatu sektor ke dalam sektor basis dan nonbasis. LQ merupakan peluasan analisis *Shift share*. MRP adalah peluasan analisis LQ dengan *Shift share* yang telah dimodifikasi. Analisis *Overlay* merupakan penggabungan hasil dari perhitungan *Shift share* dan LQ. Tipologi Klassen adalah penggabungan hasil dari perhitungan LQ dan MRP (Dominica, 2010).

Penelitian ini menggunakan alat analisis Tipologi Klassen untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah mulai dari sektor unggulan sampai dengan sektor yang tertinggal dari kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain itu,

Tipologi Klassen memiliki keunggulan yaitu lebih efisien dalam perhitungan karena telah mengadopsi dua hasil perhitungan yaitu LQ dan MRP. Penggunaan alat analisis Tipologi Klassen telah mampu menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah sesuai dengan realisasi dan serupa dengan hasil alat analisis lainnya, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang menganalisis potensi ekonomi daerah secara sektoral menggunakan berbagai alat analisis mampu menghasilkan hasil yang serupa, seperti yang dilakukan oleh Haerudin & Patrick (2016) meneliti di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor ekonomi maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sektor pertanian dan sektor jasa perusahaan. Perhitungan LQ, sektor pertanian dan sektor jasa perusahaan merupakan sektor basis. Perhitungan *Shift share*, sektor pertanian memberikan kontribusi positif dan memiliki pertumbuhan relatif cepat di Kabupaten Kepulauan Sulu.

Hariyanti & Maria (2016) meneliti sektor basis pertumbuhan daerah 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil perhitungan LQ dan Tipologi Klassen, sektor unggulan Provinsi Bali adalah sektor jasa. Sektor potensial dan berkembang terdiri dari sektor pertanian; sektor penggalian dan pertambangan; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor bangunan. Sektor industri pengolahan; sektor transportasi dan komunikasi; sektor listrik, air dan gas; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor tertinggal di Provinsi Bali.

Suwandi (2016) meneliti di Jayapura pada tahun 2009-2014. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, LQ dan *Shift share*, sektor unggulan Jayapura adalah sektor bangunan. Sektor potensial terdiri dari sektor transportasi dan komunikasi; sektor pertanian; sektor jasa; sektor listrik, air dan gas; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor berkembang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; penggalian dan pertambangan; industri pengolahan. Sektor pertanian merupakan sektor tertinggal di Jayapura.

Endi, dkk. (2015) meneliti di Kota Bandar Lampung pada tahun 2000-2012. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Tipologi Klassen, LQ dan *Shift share*, sektor ekonomi maju yang tumbuh pesat atau sektor basis yang memberikan kontribusi positif dan memiliki pertumbuhan relatif cepat di Kota Bandar Lampung adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; industri pengolahan.

Dearlinasinaga (2015) meneliti di Simalungun pada tahun 2005-2011. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen dan LQ, sektor basis dan merupakan sektor unggulan Simalungun adalah sektor jasa. Mahmud (2015) meneliti di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor maju dan tumbuh cepat di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shift share*, sektor basis yang menjadi unggulan di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian. Ratnasari (2014) meneliti di Kabupaten Kebumen pada tahun 2005-2009. Berdasarkan hasil perhitungan *Shift share*, LQ, MRP, Tipologi Klassen, dan

Overlay sektor penggalian dan pertambangan adalah sektor maju dan tumbuh dengan pesat atau sektor basis di Kabupaten Kebumen.

Wahyuningtyas (2013) meneliti di Kabupaten Kendal pada tahun 2006-2010. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor prima di Kabupaten Kendal adalah sektor penggalian dan pertambangan; sektor pertanian. Menurut perhitungan LQ, sektor pertanian; sektor penggalian dan pertambangan merupakan sektor basis. Berdasarkan hasil perhitungan MRP, salah satu sektor dominan adalah sektor penggalian dan pertambangan. Hasil analisis *Overlay*, sektor dominan adalah sektor penggalian dan pertambangan; sektor pertanian. Hasil perhitungan *Shift share*, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif dan memiliki pertumbuhan relatif cepat di Kabupaten Kendal.

Badrudin (2012) meneliti di Kabupaten/Kota Provinsi DIY pada tahun 2001-2008 dengan beberapa teknik analisis seperti *Shift share* dan Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor prima. Berdasarkan hasil perhitungan *Shift share*, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor prospektif.

Herath *et al.* (2012) menganalisis pertumbuhan ekonomi di *West Virginia*. Hasil penelitian adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor penggalian dan pertambangan; sektor industri pengolahan tidak menjadi penopang perekonomian *West Virginia*. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menurun selama 38 tahun. Sektor sektor real estat; sektor layanan dan keuangan asuransi adalah sektor maju dan tumbuh pesat dengan kontribusi 91% pada tahun

1970-2007. Sektor perdagangan besar dan eceran; sektor bangunan juga memiliki pertumbuhan ekonomi positif.

Mondal (2009) menganalisis sektor industri potensial di Malaysia dengan alat analisis *Shift share*. Sektor industri manufaktur adalah industri paling efektif ada setiap tahunnya terkecuali tahun 2004, sedangkan sektor yang efektif urutan kedua adalah sektor perdagangan. Sektor konstruksi adalah salah satu sektor yang pertumbuhannya maju dan tumbuh pesat. Sektor pertanian, pemburuan, perhutanan, perikanan; sektor penggalian dan pertambangan menempati urutan ketiga terbawah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai daerah tersebut meyakinkan bahwa pentingnya potensi ekonomi daerah untuk dianalisis guna meningkatkan penghasilan daerah agar mampu menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan publik. Penelitian yang dilakukan di Provinsi Bali masih dikategorikan relatif sedikit dan masih menggunakan sembilan sektor seperti yang dilakukan oleh Erawati & Mahaendra (2012) meneliti Kabupaten Klungkung karena kontribusi terhadap PDRB relatif rendah, Andriyani (2014) meneliti Kabupaten Karangasem karena kontribusi terhadap PDRB paling rendah, dan Susiani (2012) meneliti Kabupaten Badung karena kontribusi PDRB paling tinggi.

Penelitian yang masih menggunakan sembilan sektor PDRB diantaranya Hariyanti & Maria (2016), Suwandi (2016), Dearlinasinaga (2015). Hal tersebut mendorong peneliti untuk menggunakan 17 sektor lapangan usaha di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai obyek penelitian guna mengurangi

ketimpangan antardaerah dan meningkatkan PAD melalui pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan pada fenomena yang dialami Provinsi Bali yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana potensi ekonomi daerah Provinsi Bali perkabupaten/kota?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah Provinsi Bali perkabupaten/kota. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat menjelaskan potensi ekonomi daerah dan memberikan bukti empiris untuk dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya. Bagi praktisi daerah, sebagai bahan pertimbangan para praktisi daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam mengambil keputusan dan strategi yang diambil akan memberikan sinergi yang baik guna mengelola potensi ekonomi daerah yang dimilikinya.

Landasan teori penelitian ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah otonom mempunyai peran yang sangat kuat dalam pembangunan daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat daerah (Uremadu, 2011). Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan inisiatif pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki di daerah sebagai modal pembangunan daerah (Sudewi & Wirathi, 2013). Kebijakan otonomi daerah dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Yudistira & Jember, 2015). Pemerintah daerah

diharapkan dapat menjadi kendaraan untuk penyediaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan (Uhunmwuango & Stanley, 2013).

Landasan teori kedua penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan otonomi daerah adalah ukuran kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan PAD (Wulandari & Ayuningsasi, 2014). Menurut Mahmudi (2009:18) mewujudkan kemandirian daerah merupakan upaya pemerintah daerah mengelola PAD. Perolehan PAD yang tinggi merupakan ciri dari tingginya kemandirian daerah dalam urusan pemerintahnya (Nuryanti, 2015:22). Kenyataannya, pemerintah daerah memiliki permasalahan terkait ketergantungan fiskal disebabkan oleh minimnya PAD (Wulandari, 2014). Sebagian besar PAD berasal dari pemerintah pusat (Venning, 2009). Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi bagian penting dari pembiayaan daerah dalam memenuhi tanggung jawab pengeluaran daerah (Rodriguez and Anne, 2009). Peningkatan PAD merupakan indikasi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi atau PDRB, karena keduanya memiliki keterkaitan (Saragih, 2003:55). Salah satu sumber terbesar dari PAD adalah pajak (Rotimi, 2013) dan (Olatunji *et al.*, 2009).

Landasan teori ketiga penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dan tidak terdapatnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah (Nikijuluw, 2014). PDRB adalah jumlah nilai tambah

seluruh lapangan usaha yang dimiliki suatu wilayah pada waktu tertentu yang dapat disebut dengan PDRB menurut lapangan usaha.

Landasan teori terakhir penelitian ini adalah potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi daerah adalah segala sumber daya atau kemampuan ekonomi yang dimiliki suatu daerah yang dikembangkan menjadi sumber pendapatan guna meningkatkan perekonomian daerah (Erawati & Mahaendra, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis potensi ekonomi daerah Provinsi Bali perkabupaten/kota pada tahun 2012-2015. Lokasi penelitian terdapat di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar diakses melalui data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Data kualitatif berupa artikel-artikel dari penelitian sebelumnya, sedangkan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendukung perhitungan Tipologi Klassen adalah (1) data PDRB; (2) data PDRB secara sektoral; (3) laju pertumbuhan PDRB dan (4) laju pertumbuhan masing-masing sektor. Data tersebut diperoleh dari data PDRB Provinsi Bali perkabupaten/kota atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2012-2015 yang dipublikasi di *website* Badan Pusat Statistik perkabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh potensi ekonomi daerah berupa 17 sektor lapangan usaha dalam PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2015. 17 sektor lapangan usaha tersebut terdiri dari sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Informasi dan Komunikasi; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah, Sampah dan Daur Ulang; (5) Pengadaan Listrik dan Gas; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Eceran dan Besar, Reparasi Sepeda Motor dan Mobil; (8) Industri Pengolahan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Penggalian dan Pertambangan; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaann; (14) Administrasi Pemerintah, Jaminan Sosial Wajib dan Pertahanan; (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Pendidikan dan (17) Jasa Lainnya.

Keseluruhan populasi penelitian ini dipergunakan sebagai sampel untuk menganalisis potensi ekonomi daerah Provinsi Bali perkabupaten/kota pada tahun 2012-2015, sehingga metode penentuan sampel penelitian ini adalah sensus atau metode sampling jenuh.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Tipologi Klassen. Menurut Mahmudi (2009:55) untuk melakukan analisis Tipologi Klassen, langkah-langkah yang dilakukan adalah menghitung rata-rata PDRB (\hat{Y}_{PDRB}), menjumlahkan total PDRB kemudian dibagi dengan n tahun (n tahun = jumlah tahun penelitian). Hasil rata-rata tersebut kemudian dibagi dengan n sektor lapangan usaha (n sektor lapangan usaha = jumlah sektor lapangan usaha yang diteliti). Kedua, menghitung

rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (\hat{Y}_{SEKTOR}), menjumlahkan total kontribusi masing-masing sektoral kemudian dibagi n tahun.

Ketiga, menghitung rata-rata laju pertumbuhan sektoral (r_{SEKTOR}) dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}), dengan cara menjumlahkan masing-masing sektor dan total laju pertumbuhan PDRB, kemudian dibagi n tahun. Keempat, membandingkan hasil perhitungan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB dengan rata-rata PDRB dan membandingkan hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan sektoral PDRB dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB. Terakhir, Mengklasifikasikan masing-masing sektor lapangan usaha ke dalam matriks atau kuadran Tipologi Klassen seperti Tabel 3.

Tabel 3.
Kategori Sektor berdasarkan Tipologi Klassen

Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB		
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$	$\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$
$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	Sektor Unggulan	Sektor Berkembang
$r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber: Mahmudi, 2009:55

Keterangan:

\hat{Y}_{SEKTOR} = rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB

r_{SEKTOR} = rata-rata laju pertumbuhan sektoral

\hat{Y}_{PDRB} = rata-rata PDRB

r_{PDRB} = rata-rata laju pertumbuhan PDRB

- 1) Sektor unggulan (prima), perolehan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (\hat{Y}_{SEKTOR}) lebih besar dari rata-rata PDRB (\hat{Y}_{PDRB}) dan perolehan rata-rata laju pertumbuhan sektoral (r_{SEKTOR}) lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}).
- 2) Sektor potensial, perolehan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (\hat{Y}_{SEKTOR}) lebih besar dari rata-rata PDRB (\hat{Y}_{PDRB}) dan perolehan rata-rata laju

pertumbuhan sektoral (r_{SEKTOR}) lebih kecil dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}).

- 3) Sektor berkembang, perolehan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (\hat{Y}_{SEKTOR}) lebih kecil dari rata-rata PDRB (\hat{Y}_{PDRB}) dan perolehan rata-rata laju pertumbuhan sektoral (r_{SEKTOR}) lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}).
- 4) Sektor terbelakang, perolehan rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB (\hat{Y}_{SEKTOR}) lebih kecil dari rata-rata PDRB (\hat{Y}_{PDRB}) dan perolehan rata-rata laju pertumbuhan sektoral (r_{SEKTOR}) lebih kecil dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kabupaten Jembrana

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan di Kabupaten Jembrana selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 408.932,7 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,02% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor konstruksi, dan (5) sektor informasi dan komunikasi.

Potensi ekonomi yang sedang berkembang di Kabupaten Jembrana dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 408.932,7 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,02% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor industri pengolahan, (3) sektor jasa keuangan dan asuransi, (4) sektor jasa pendidikan dan (5) sektor jasa

kesehatan dan kegiatan sosial. Potensi ekonomi yang menjadi potensial di Kabupaten Jembrana dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 408.932,7 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,02% yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Potensi ekonomi yang terbelakang di Kabupaten Jembrana selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 408.932,7 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,02% yaitu (1) sektor pengadaan listrik dan gas, (2) sektor administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib dan pertahanan, (3) sektor jasa perusahaan, (4) sektor jasa lainnya, (5) sektor penggalian dan pertambangan, dan (6) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang.

2) Kabupaten Tabanan

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Tabanan selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 679.975,79 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,34% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (3) sektor konstruksi, dan (4) sektor informasi dan komunikasi.

Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Tabanan dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 679.975,79 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,34% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor industri pengolahan, (3) sektor jasa keuangan dan asuransi, (4) sektor kesehatan dan kegiatan sosial, (5) sektor jasa lainnya, (6) sektor jasa pendidikan, (7) sektor penggalian dan pertambangan dan (8) Jasa Perusahaan.

Potensi ekonomi potensial Kabupaten Tabanan dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 679.975,79 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,34% yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (2) sektor administrasi, Pertahanan dan jaminan sosial wajib. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Tabanan dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 679.975,79 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,34% yaitu (1) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang, (2) sektor transportasi dan pergudangan, dan (3) sektor pengadaan listrik dan gas.

3) Kabupaten Badung

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Badung selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.563,67 miliar dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,93% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor konstruksi, (3) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (4) sektor informasi dan komunikasi. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Badung dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.563,67 miliar dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,93% yaitu (1) sektor industri pengolahan, (2) sektor real estat, (3) sektor jasa pendidikan, (4) sektor jasa keuangan dan asuransi, dan (5) sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

Potensi ekonomi potensial Kabupaten Badung dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.563,67 miliar dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,93% yaitu (1) sektor transportasi dan pergudangan, dan (2) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Badung dengan

perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.563,67 miliar dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,93% yaitu (1) sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, (2) sektor jasa lainnya, (3) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang, (4) sektor penggalian dan pertambangan, (5) sektor jasa perusahaan (6) sektor pengadaan listrik dan gas.

4) Kabupaten Gianyar

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Gianyar selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 813.516,47 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,77% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor industri pengolahan, (3) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (4) sektor konstruksi, dan (5) sektor informasi dan komunikasi.

Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Gianyar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 813.516,47 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,77% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor jasa keuangan dan asuransi, (3) sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan (4) sektor jasa pendidikan. Potensi ekonomi potensial Kabupaten Gianyar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 813.516,47 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,77% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor jasa pendidikan (3) sektor jasa keuangan dan asuransi, dan (4) sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Gianyar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 813.516,47 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,77% yaitu (1) sektor jasa lainnya, (2) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah,

sampah dan daur ulang, (3) sektor penggalian dan pertambangan (4) sektor jasa perusahaan, (5) sektor transportasi dan pergudangan, dan (6) sektor pengadaan listrik dan gas.

5) Kabupaten Klungkung

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Klungkung selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 259.795,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,10% yaitu (1) sektor informasi dan komunikasi, (2) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor konstruksi, dan (5) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Klungkung dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 259.795,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,10% yaitu (1) sektor kesehatan dan kegiatan sosial, (2) sektor jasa keuangan dan asuransi, (3) sektor transportasi dan pergudangan, (4) sektor real estat, dan (5) sektor jasa pendidikan.

Potensi ekonomi potensial Kabupaten Klungkung dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 259.795,6 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,10% yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (2) sektor administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib dan pertahanan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Klungkung dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 259.795,6 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,10% yaitu (1) sektor jasa perusahaan, (2) sektor jasa lainnya, (3) sektor pengadaan listrik dan gas, (4) sektor penggalian dan pertambangan, dan (5) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang.

6) Kabupaten Bangli

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Bangli selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 199.094,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,04% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (3) sektor industri pengolahan, (4) sektor konstruksi. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Bangli dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 199.094,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,04% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor informasi dan komunikasi, (3) sektor jasa lainnya, (4) sektor jasa pendidikan, (5) sektor jasa keuangan dan asuransi, (6) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (7) sektor transportasi dan pergudangan, dan (8) sektor jasa perusahaan.

Potensi ekonomi yang potensial Kabupaten Bangli dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 199.094,6 juta dan $r_{SEKTOR} > r_{PDRB}$ sebesar 6,04% yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (2) sektor administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib dan pertahanan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Bangli dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 199.094,6 juta dan $r_{SEKTOR} > r_{PDRB}$ sebesar 6,04% yaitu (1) sektor penggalian dan pertambangan, (2) sektor pengadaan listrik dan gas, dan (3) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang.

7) Kabupaten Karangasem

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Karangasem selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 485.520,63

juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,03% yaitu (1) sektor konstruksi, (2) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan (3) sektor transportasi dan pergudangan. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Karangasem dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 485.520,63 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,03% yaitu (1) sektor jasa pendidikan, (2) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, (3) sektor industri pengelolaan, (4) sektor jasa keuangan dan asuransi, (5) sektor informasi dan komunikasi, (6) sektor real estat, (7) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan (8) sektor jasa perusahaan.

Potensi ekonomi potensial Kabupaten Karangasem dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 485.520,63 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,03% yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (2) sektor administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib dan pertahanan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Karangasem dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 485.520,63 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,03% yaitu (1) sektor penggalan dan pertambangan, (2) sektor jasa lainnya, (3) sektor pengadaan listrik dan gas, dan (4) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang.

8) Kabupaten Buleleng

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kabupaten Buleleng selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.009.309,9 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,75% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor informasi dan komunikasi, (3) sektor konstruksi, (4)

sektor jasa pendidikan, dan (5) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kabupaten Buleleng dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.009.309,9 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,75% yaitu (1) sektor industri pengelolaan, (2) sektor jasa keuangan dan asuransi, dan (3) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Potensi ekonomi potensial Kabupaten Buleleng dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.009.309,9 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,75% yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (2) sektor administrasi pemerintahan, jaminan sosial wajib dan pertahanan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kabupaten Buleleng dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.009.309,9 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,75% yaitu (1) sektor real estat, (2) sektor jasa lainnya, (3) sektor penggalian dan pertambangan, (4) sektor jasa perusahaan, (5) sektor transportasi dan pergudangan, (6) sektor pengadaan listrik dan gas, dan (7) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang.

9) Kota Denpasar

Potensi ekonomi yang menjadi unggulan Kota Denpasar selama empat tahun terakhir dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.524.033,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,91% yaitu (1) sektor jasa pendidikan, (2) sektor konstruksi, (3) sektor perdagangan eceran dan besar; reparasi sepeda motor dan mobil, dan (4) sektor jasa keuangan dan asuransi. Potensi ekonomi yang sedang berkembang Kota Denpasar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.524.033,6 juta dan $r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$ sebesar 6,91% yaitu (1) sektor informasi

dan komunikasi, (2) sektor real estat, dan (3) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Potensi ekonomi potensial Kota Denpasar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.524.033,6 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,91% yaitu (1) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (2) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan (3) sektor industri pengolahan. Potensi ekonomi yang terbelakang Kota Denpasar dengan perolehan $\hat{Y}_{SEKTOR} < \hat{Y}_{PDRB}$ sebesar Rp 1.524.033,6 juta dan $r_{SEKTOR} < r_{PDRB}$ sebesar 6,91% yaitu (1) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, (2) sektor transportasi dan pergudangan, (3) sektor jasa perusahaan, (4) sektor pengadaan listrik dan gas, (5) sektor jasa lainnya, (6) sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang, dan (7) sektor penggalian dan pertambangan.

Berdasarkan pembahas hasil penelitian potensi ekonomi daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka menurut Mahmudi (2009:49) implikasi hasil pemetaan potensi ekonomi daerah tersebut terhadap kebijakan manajemen keuangan publik adalah:

- 1) Pada sektor unggulan, pemerintah daerah tingkat II harus menjaga stabilitas pertumbuhan dari sektor unggulan tersebut, sebab sektor unggulan tersebut merupakan kekuatan dan daya saing daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jika sektor unggulan tidak dioptimalkan dengan baik dapat berubah menjadi sektor potensial, yakni pertumbuhannya mengalami penurunan meskipun kontribusi terhadap PDRB besar.

Kondisi sektor unggulan menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu mengelola potensi yang ada yang baik. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang tergolong dalam sektor unggulan adalah dengan melakukan peningkatan promosi dan melakukan ekspansi.

- 2) Pada sektor berkembang merupakan alternatif bagi daerah untuk ditingkatkan lagi kontribusinya sehingga berubah menjadi sektor unggulan. Jika sektor berkembang tidak dioptimalkan dengan baik, maka berubah menjadi sektor terbelakang. Pada sektor berkembang, kondisi kemampuan pemerintah mempunyai kapasitas untuk mengelola potensi tersebut. Namun, potensi tersebut masih berkontribusi rendah sehingga strategi yang tepat untuk mempertahankan adalah dengan ekstensifikasi atau ekspansi.
- 3) Pada sektor potensial, kondisi kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi tersebut kurang memadai, sehingga sektor potensial ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah tetapi pertumbuhannya cenderung menurun. Jika sektor potensial tidak dioptimalkan, maka berubah menjadi sektor terbelakang.

Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan (1) intensifikasi pendapatan, (2) kemitraan dengan pihak swasta, (3) *joint venture* dengan investor dalam memanfaatkan (eksploitasi) potensi yang ada, dan (4) peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola potensi tersebut melalui pembinaan dan pembenahan.

- 4) Pada sektor terbelakang, pemerintah daerah tingkat II diharapkan meningkatkan kontribusi sektor yang terbelakang agar dapat menjadi potensi

ekonomi yang mendukung perekonomian suatu daerah. Menurut Mahmudi (2009:49), kondisi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sektor terbelakang perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan (edukasi) serta pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas mengelola potensi pendapatan secara optimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian potensi ekonomi daerah di Provinsi Bali perkabupaten/kota menggunakan analisis Tipologi Klassen, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sektor unggulan yang sama di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2015 adalah sektor konstruksi, sektor berkembang adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor potensial adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor terbelakang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang; sektor pengadaan listrik dan gas.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu bagi peneliti selanjutnya adalah menganalisis potensi ekonomi daerah menggunakan subsektor dari komoditi masing-masing sektor yang tercantum dalam PDRB. Bagi praktisi pengelola potensi ekonomi daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dengan memprioritaskan sektor-sektor yang tergolong unggulan dan potensial, namun tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya guna meningkatkan peran masing-masing sektor, sehingga pada akhirnya seluruh sektor yang merupakan potensi

ekonomi daerah tersebut secara bersama-sama dapat mendukung peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan perolehan PDRB. Upaya tersebut disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Indonesia dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perkabupaten/kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Andriyani, Sri. 2014. Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karangasem. *Skripsi* tidak dipublikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ke 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, Rudy. 2012. Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Tipologi Klasen dan Location Quotient. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 7(1):17-37.
- Barro, Robert J. 1991. Economic Growth In A Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2): 407-433.
- Carlin, Wendy and Colin Mayer. 2003. Finance, Investment and Growth. *Journal of Financial Economics*, 69: 191-226.
- Dearlinasinaga. 2015. Determination Analysis of Leading Economic Sector Against Forming Region GDP in Simalungun. *International Journal of Innovative Research in Management*, 4(3): 1-12.
- Dominica, Rubidiyanti. 2010. Analisis Sektor Perekonomian di Kabupaten Bogor. *Tesis* publikasi, Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Endi, Rizal, Suparta dan Muhammad Husaini. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah di Kota Bandar Lampung 2000-2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1):107-134.
- Erawati, dan Mahaendra Yasa. 2012. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 1 (1):41-61.

- Haerudin, Vecky. A. J. Masinambow, dan Patrick C. Wauran. 2016. Kajian Potensi Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), pp: 232-243.
- Hariyanti, Dini and Maria Ariesta Utha. 2016. Analysis of Determinants Sectors Regional Development at 33 Provinces in Indonesia. *Ontario International Development Agency (OIDA) International Journal of Sustainable Development*, 9(3): 11-36.
- Herath, Janaranjana, Tesfa G. Gebremedhin and Blessing M. Maumbe. 2011. A Dynamic Shift Share Analysis of Economic Growth in West Virginia. *Journal of Rural and Community Development*, 6(2): 115-169.
- Mack, Richard S. and David S. Jacobson. 1996. Core Periphery Analysis of The European Union: A Location Quotient Approach. *The Journal of Regional Analysis & Policy*, 26(1): 3-21.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmud, Wildan M. 2015. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah publikasi*, Universitas Brawijaya.
- Munandar, Tb. Ai and Edi Winarko. 2015. Regional Development Classification Model Using Decision Tree Approach. *International Journal of Computer Applications*, 114(8): 28-33
- Mondal, Wali I. 2009. An Analysis of The Industrial Development Potential of Malaysia: A Shift-Share Approach. *Journal of Business & Economics Research*, 7(5): 41-46.
- Nikijuluw, Jeanee B. 2014. Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika* Universitas Pattimura, 8(1):1-14.
- Nuryanti. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Skripsi* tidak dipublikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Medwell Journal International Business Management*, 3(3): 54-60.
- Ratnasari, Emma Dwi. 2014. Sectors Analysis and Determination of GDP Forming Leading Sector in District Kebumen. *Jurnal Fokus Bisnis*, 13(1):1-29.

- Rodriguez, Andres-Pose and Anne Kroijs. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *LEQS paper*, 12: 1-37.
- Rotimi, Oladele. Dr. Uduma Samuel. Aka Udu. Aderemi Adefunji Abdul-Azeez. 2013. Revenue Generation and Engagement of Tax Consultants in Lagos State Nigeria Continuous Tax Evasion and Irregularities. *European Journal of Business and Social Sciences*, 1(1): 25-36.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sudewi, Ayu dan Wirathi. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3):135-141.
- Susiani. 2012 Analisis Penentuan Sektor Potensial di Kabupaten Badung Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto 2001-2010. *Skripsi* tidak dipublikasi, Program Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
- Suwandi. 2016. Structure and Economic Development Pattern in Jayapura Through Other and Towns in Papua. *European Journal of Social Sciences*. 52(1): 5-13.
- Uhunmwuango, S.O. and Stanley Aibieyi. 2013. Problems of Revenue Generation in Local Government Administration in Nigeria. *An International Journal of Arts and Humanities Bahir Dar, Ethiopia*, 2(3): 192-209.
- Uremadu, S.O. and J.C. Ndulue. 2011. A Review of Private Sector Tax Revenue Generation at Local Government Level: Evidence from Nigeria. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 3(6): 174-183.
- Yudistira, dan Jember. 2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2):121-128.
- Venning, Philippa. 2009. Impact of Budget Support on Accountabilities at The Local Level in Indonesia. *EDCD Journal on Budgeting*, Vol. 1: 1-29.
- Wahyuningtyas. 2013. Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). *Jurnal Gaussian Universitas Diponegoro*, 2(3):219-228.
- Wulandari, Pande Paramitha dan Ayuningsasi. 2014. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(11):530-539.